

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan yang menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir adalah Kemiskinan, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya di alami oleh negara berkembang, namun juga bagi negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai (Cheyne, Christine, dkk, 1998).

Dasar hukum dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara wajib melindungi “Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Satu dekade ini, pemerintah telah mampu menghadapi permasalahan kemiskinan tersebut, dimana pada kepemimpinan sebelumnya, masalah kemiskinan menjadi topik utama. Setiap pemimpin negara ini selalu menjadikan kemiskinan sebagai misi utamanya, ini dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan tiap tahun, disamping menjalankan misi-misi yang lainnya.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan meliputi Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan kesejahteraan Rakyat

Kredit Usaha Untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra) Program Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta program P2KP yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan. (Solikatun dan Masruroh 2014).

Badan Pusat Statistik Indonesia merilis data pada bulan September 2017 tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia, dari 260 juta penduduk Indonesia 10,12 % merupakan penduduk miskin, ini menandakan bahwa 26,58 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, kategori penduduk miskin ditentukan berdasarkan pengeluaran perkapita tiap bulannya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk yaitu 5.259.528 juta jiwa (BPS 2016,) dipimpin oleh Irwan Prayitno sebagai Gubernur dan Nasrul Abit sebagai wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 dengan memiliki visi “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Dalam visi tersebut peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu poin utama yang diprioritaskan oleh pemerintah. Secara umum permasalahan kesejahteraan pada Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh kemiskinan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, kemandirian dan produktivitas, aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai, peranan kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal, kualitas manajemen dan pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai serta Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas (RPJMD Sumatera Barat 2016-2021).

Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya sarana dan prasarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik (RPJMD Sumatera Barat 2016-2021).

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dengan persentase 6.75 % (364.51), Usaha pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kesejahteraan terutama kemiskinan telah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan sebelas tahun terakhir, meskipun pada tahun 2015 terjadi kenaikan.

Meskipun kemiskinan Sumatera Barat berada pada 6.75 %, namun jika dilihat berdasarkan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini Ratio) di Provinsi Sumatera Barat masih dikategorikan cukup tinggi.

Gini ratio berfungsi untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah (Badan Pusat Statistik). Pada tahun 2017 indeks gini ratio Sumatera Barat berada pada ratio 0.312 yang dapat dikelompokkan pada

posisi tingkat ketimpangan yang sedang. Penyebabnya adalah Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten yang tertinggal yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat.

Ketertinggalan daerah tersebut disebabkan oleh aksesibilitas yang masih terbatas seperti akses jalan ke pusat-pusat pertumbuhan, terbatasnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, terbatasnya potensi sumber daya alam, kapasitas sumber adaya yang masih terbatas, oleh sebab itu penanganan masalah kemiskinan msih menjadi prioritas pemerintah Sumatera Barat hal ini dilihat dalam RPJMD Provinsi Sumatera barat tahun 2016-2021, dimana tingkat ketimpangan turun dan kemiskinan ditargetkan menjadi 5.09 % pada tahun 2022.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah, Mankiw (2006) mengemukakan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pengangguran, dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, perusahaan akan memilih untuk menurunkan produksi barang maupun jasa, sehingga pemecatan karyawan akan terjadi dan dengan sendirinya akan meningkatkan pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajakaiye (2002) menemukan bawah faktor faktor yang memiliki konstribusi terhadap tingginya kemiskinan pada negara-negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, kebijakan makro ekonomi yang tidak tepat, pasar tenaga kerja yang tidak efisien, produktifias upah dan sdm yang rendah,

Ayu, Made, Nyoman (2017) menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja, sedangkan menurut Yustie dan Eriqbaldi (2014) belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinaan, sedangkan Nafziger (1997) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam meningkatkan atau menurunkan kemiskinan. hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan pada suatu daerah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin,

Pada tahun 2017, pemerintah Sumatera Barat juga dihadapkan pada masalah adanya peningkatan angka pengangguran sebesar 12.8 ribu orang (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat). Menurut Cholili (2014) terjadinya pengangguran akan diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan, jika konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka secara langsung pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan baik diukur dari sisi pendapatan maupun diukur dari sisi konsumsi sehingga ini menandakan bahwa pentingnya menjaga tingkat pengangguran, namun penelitian yang dilakukan oleh Septyana dan Nyoman (2013), menemukan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinaan di Provinsi Bali, penyebabnya adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Salah satu indikator dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya konsumsi (Badan Pusat Statistik). Terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui daya beli masyarakat (konsumsi). Badan Pusat Statistik Sumatera Barat merilis bahwa tingkat inflasi Sumatera Barat Pada tahun 2017 adalah 2.03 %, lebih rendah dari pada inflasi Indonesia yang mencapai 3.61 %.

Terdapat tiga akibat yang ditimbulkan dengan adanya inflasi (Sukirno, 2004), pertama inflasi menurunkan pendapatan riil penduduk yang berpenghasilan tetap sehingga nilai riil uang yang dipegang menjadi turun, kedua, inflasi mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, dan yang ketiga adalah memperburuk pembagian kekayaan.

Windra, dkk (2016) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan namun adanya kecenderungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia, Hambarsari dan Kunto, (2016) juga menemukan hasil yang sama bahwa inflasi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan disebabkan penyebabnya adalah inflasi yang tergolong ringan, mudah di kendalikan dan adanya operasi pasar. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Niswati, (2014) inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, disebabkan oleh laju inflasi selalu lebih rendah dari pada upah minimum kabupaten.

Melihat besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan suatu daerah, maka penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yang

berjudul “**Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1988-2017 Dengan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Pandangan ekonomi baru menganggap bahwa tujuan utama pembangunan tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata, namun juga mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi merupakan variabel penting yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan kinerja perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki tugas dalam mengatasi masalah tersebut, ini tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945.

Salah satu cara mengatasi permasalahan ini dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang berpengaruh langsung/tidak langsung terhadap kemiskinan melalui variabel makro ekonomi meliputi kebijakan fiskal (meningkatkan pajak) maupun kebijakan moneter (menurunkan suku bunga), sehingga dapat menurunkan persentase kemiskinan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti secara spesifik dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana variabel makro ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

- B. Menganalisis variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Sumatera Barat?
- C. Merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan

- A. Menganalisis serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
- B. Mendeskripsikan variabel makro ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
- C. Menetapkan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan untuk menurunkan kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan terutama dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk meneliti Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1988-2017 dengan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL).

1.5. Ruang Lingkup

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh yang ditimbulkan oleh variable makro ekonomi terhadap kemiskinan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah provinsi Sumatera Barat. Periode waktu penelitian dari tahun 1988-2017 dengan menggunakan pendekatan ARDL (Autoregressive Distribution Lag).

Variabel yang mempengaruhi (Dependen) dalam permasalahan kemiskinan ini adalah variabel-variabel makro ekonomi yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bab ini berisikan teori-teori dan literatur pendukung yang berkaitan dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi. Selain itu bab ini juga menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian disusun sebuah hipotesa yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan membahas mengenai beberapa sub bab yang meliputi data dan sumber data, defenisi operasional variabel, metode analisis data seperti uji stasioner data, penentuan lag optimum, uji kointegrasi, estimasi ARDL, dan uji stabilitas data.

BAB IV : Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan tentang perkembangan masing-masing variable penelitian, yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pengangguran dan inflasi di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan hasil analisa dari pengolahan data, terdiri dari seperti uji stasioner data, penentuan lag optimum, uji kointegrasi, estimasi ARDL, dan uji stabilitas data serta pembahasan dari hasil olahan tersebut.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini adalah bagian akhir dari penelitian, pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.